

SEKILAS MEDIA

Sumut Pos
Jumat, 4 Maret 2011

"KPK KEMBALI OBOK-OBOK PEMPROVSU"

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memintai keterangan dua pejabat Pemprovsumu dari Biro Bina Sosial (Binosos) berinisial HI, dan Biro Keuangan berinisial MS. Kedua pejabat ini dimintai keterangannya di Lantai III Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut, Jalan Imam Bonjol. Kasubag Hukum Humas BPK Perwakilan Sumut Mikael Togatorop membenarkan penyidik KPK meminjam ruang rapat BPK di lantai III untuk pemeriksaan.

Sumut Pos
Selasa, 8 Maret 2011

"KASUS KORUPSI LANGKAT TERBESAR DI INDONESIA"

Perkara dugaan korupsi APBD Langkat memang cukup fenomenal lantaran tergolong besar. Bayangkan saja, dugaan kerugian Negara dalam kasus Langkat, menurut audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), jumlahnya mencapai Rp102,7 miliar. Dan ternyata jumlah itu melebihi jumlah kerugian negara pada empat perkara korupsi di daerah yang ditangani KPK sepanjang 2010.

Sumut Pos
Jumat, 18 Maret 2011

"DUGAAN KORUPSI APBD LANGKAT RP102,7 MILIAR : BENDAHARA SYAMSUL DITAHAN"

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) menahan Buyung Ritonga, mantan bendahara / kepala pemegang kas pemkab Langkat semasa kepemimpinan Syamsul Arifin. Kasus dugaan korupsi APBD sebesar Rp102,7 miliar ditangani Kejatisu atas laporan dari Ketua BPK RI Anwar Nasution kepada KPK dengan surat pengaduan Nomor 26/R/S/I-XXV/03/2009 bertanggal 16 Maret 2009.

Harian Waspada
Selasa, 29 Maret 2011

"BARU 3 PEMDA SERAHKAN LKPD, BPK TIDAK BERI TOLERANSI"

Menjelang batas akhir 31 Maret 2011, hingga Kamis (24/3), baru tiga kabupaten/kota di Sumatera Utara yang telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2010 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Hal itu dikemukakan Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Oodj Huziat kepada wartawan, kemarin. Tentang berkas dari tiga daerah yang telah diterima BPK, Oodj Huziat mengemukakan dua bulan setelah diterima secara resmi jika tidak ada kekurangan berkas hasilnya sudah dapat diketahui.

REDAKSI

Mikael PH Togatorop (mt),

Barani M Silalahi (bs), Hj.Sri Madonna (sm), Hj.Ony Mauli (oni), Parulian (uli), Monika (mon),

Ermila Oethari (mil), Suhendri (henz), Totok (ttk), Ardhyan (ard), Arief R (arra),

Diah Kusumawati Rukminingtyas (dkr)

ALAMAT REDAKSI : BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Lt. IV, Jl. Imam Bonjol No.22 Medan

Telp. 061-4519039 ext. 321



DARI REDAKSI

MARI BELAJAR, MARI TERAPKAN

Berbagai terobosan baru telah dilakukan oleh BPK RI dalam rangka mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut juga harus diimbangi dengan kemampuan para pegawai BPK RI untuk mengimplemantasikan terobosan tersebut dilapangan.

Keberadaan para pegawai memiliki peranan vital. Keberhasilan BPK RI dalam menjalankan tugasnya sangat ditentukan oleh kualitas orang-orang yang bekerja di dalamnya. Kinerja setiap pegawai merupakan kunci pencapaian produktivitas. Pengembangan SDM berbasis kompetensi dilakukan agar dapat memberikan hasil yang sesuai dengan standar kerja yang diterapkan.

Sosialisasi dan pelatihan merupakan salah satu solusi peningkatan kompetensi dari pegawai. Berbagai kegiatan pelatihan maupun sosialisasi digelar secara internal oleh BPK RI baik di Pusdiklat maupun di Perwakilan masing-masing.

Cukupkah hanya dengan menambah pengetahuan? Seorang filsuf Jerman, Johann Wolfgang von Goethe mengungkapkan, "Pengetahuan tidaklah cukup, kita harus mengamalkannya". Belajar teori saja tidak cukup, harus ada pengalaman yang mematangkan aplikasi teori tersebut.

Jadi seorang pegawai seharusnya tidak seharusnya menerima suatu pengetahuan baru tanpa pernah mencoba menerapkannya sebagai pegawai. Sebab kemauan untuk menerapkan pengetahuan baru yang didapat bagaikan angin dibawah sayap yang mampu menerbangkan pemilik sayapnya mencapai produktivitas kerja yang diharapkan oleh BPK RI. [arra]

Hal.1

- Dari Redaksi
- Sosialisasi Peraturan
BPK dan Gelaran
Persidangan Semu

Hal.2

- Pekan Raya
Sumatera Utara

Daftar Isi...

Hal.3

- Kesadaran Entitas
untuk Menyerahkan
LKPD Tepat Waktu

Hal.4

- Sekilas Media

SOSIALISASI PERATURAN BPK RI DAN GELARAN PERSIDANGAN SEMU

Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para pemeriksa, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mengadakan Sosialisasi Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli. Kegiatan tersebut diadakan di ruang Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut pada 23 Maret 2011.

Seluruh pemeriksa di lingkungan kerja BPK RI Provinsi Sumut hadir pada kegiatan tersebut. Sedangkan bertindak sebagai pembicara adalah Kepala Sub Direktorat Kepaniteraan Kerugian Negara dan Daerah, Eko Setyo Nugroho dan Kepala Seksi Konsultasi Hukum Keuangan Negara yang Dipisahkan Indra Saputro.

Untuk lebih membuka wawasan tentang kedua peraturan terse-

.....bersambung ke halaman 3



PEKAN RAYA SUMATERA UTARA (PRSU)



Banyak yang mengatakan, bila ingin keliling Indonesia dalam satu hari maka berkunjunglah ke Taman Mini Indonesia di Jakarta. Hal serupa sebenarnya berlaku juga di Sumatera Utara. Bila ada yang menanyakan bagaimana keliling Sumatera Utara dalam satu hari, maka jawabannya adalah berkunjunglah ke Pekan Raya Sumatera Utara atau sering disingkat dengan PRSU.

Kegiatan tahunan yang diselenggarakan di Arena PRSU

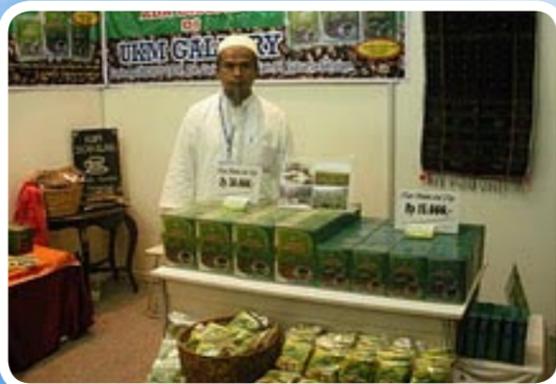
Jl. Gatot Subroto Km.5 Tapani Daya, Medan tersebut menawarkan pengalaman mengenal kebudayaan dan keragaman daerah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Untuk tahun 2011, PRSU yang memasuki edisi ke-40 ini diselenggarakan 18 Maret sampai dengan 17 April 2011.

33 kabupaten/kota di Sumut berpartisipasi di PRSU. Masing-masing memiliki stand sendiri berupa gedung berlantai dua yang dimanfaatkan untuk memamerkan ke khasan daerah masing-masing. Diantaranya yang ditampilkan adalah rumah adat, hasil kerajinan rakyat, hasil alam, industri, pakaian adat, senjata tradisional, dan pelaminan.

Untuk tiap bangunan dikonsep berbeda oleh setiap kabupaten/kota sesuai karakter budaya masing-masing. Misalnya untuk kabupaten Toba Samosir dikonsep seperti rumah adat Batak. Bagi yang menginginkan oleh-oleh khas di Sumut, tiap stand menyediakannya untuk para pengunjung sesuai dengan khas daerah masing-masing. Seperti kopi Sidikalang di stand Pemkab Dairi, dan keripik salak di stand Pemko Padangsidimpuan.

Tak hanya itu, PRSU juga diramaikan oleh bazar bazar murah, Pameran UKM, dan pasar malam. Untuk menambah semarak acara, setiap akhir pekan selama acara dilaksanakan dihadirkan band band papan atas Indonesia yang akan manggung meramaikan PRSU. Tercatat untuk tahun 2011 hadir memeriahkan adalah Armada, Drive, D'Bagindas, Goliath, Zivilia dan Vierra.

Keunggulan dari acara ini adalah memadukan hiburan dan pendidikan sehingga selain bisa mengenal kebudayaan dan keragaman kesenian, suku, serta adat dari setiap daerah, kita tidak akan bosan untuk terus menikmati hal hal baru yang menghibur disetiap stand. Sangat baik dan tidak akan menjemukan untuk mengajak anak-anak belajar mengenal kebudayaan sendiri dan mengetahui informasi penting mengenai pertambangan, pertanian, perkebunan, dll melalui wisata seperti ini. [arra]



KESADARAN ENTITAS UNTUK MENYERAHKAN LKPD TEPAT WAKTU KEMBALI MENINGKAT

Kesadaran entitas di lingkungan kerja BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada BPK RI sesuai dengan batas waktu yang ditentukan Peraturan Perundang-undangan pada tahun 2011 mengalami kemajuan. Sampai dengan akhir Maret 2011, ada 15 (lima belas) entitas yang telah menyerahkan LKPD kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk diperiksa. Hal ini merupakan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2009 (3 entitas) dan tahun 2010 (11 entitas)

Kabupaten Karo menjadi entitas pertama yang menyerahkan pada 16 Maret 2011. Diikuti pada hari yang berlainan Kabupaten Tapanuli Utara, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Samosir, Asahan, Kota Medan, Serdang Bedagai, Pakpak Bharat, Dairi, Labuhanbatu, Mandailing Natal, Humbang Hasundutan, Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dan Kabupaten Langkat

Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 pasal 102 ayat (1) dan Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006, seharusnya Laporan Keuangan disampaikan kepada

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir. Hal tersebut berarti paling lambat Laporan Keuangan harus sudah diterima BPK sampai dengan akhir Maret.

Menindaklanjuti penyerahan Laporan Keuangan tersebut, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut segera memberangkatkan tim untuk ditugaskan melakukan Pemeriksaan atas LKPD tersebut. Pemberangkatan tim dilakukan secara bertahap mulai akhir Maret 2011 sampai dengan medio April 2011. Diharapkan paling lambat akhir Mei 2011 BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD kelima belas entitas tersebut. [arra]



.....sambungan Sosialisasi Peraturan BPK RI

but, selain sesi pemaparan narasumber juga memberikan kesempatan para peserta untuk melakukan Tanya jawab. Kesempatan tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh para peserta sehingga acara berjalan dengan dinamis.

Khusus untuk Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan, untuk lebih memantapkan pemahaman terhadap materi maka digelar Persidangan Semu (mootcourt). Persidangan tersebut mengambil tempat ruang sidang Universitas Sumatera Utara (USU). Hadir sebagai peserta adalah para auditor di lingkungan kerja BPK RI Provinsi Sumatera Utara, termasuk Kepala Perwakilan Oodj Hudziat dan para pejabat struktural. Hadir dalam kegiatan tersebut adalah Hakim dari Pengadilan Negeri Medan, Dekan Fakultas Hukum USU, Kejaksaan Negeri Medan, dan pengacara dari Kantor Pengacara serta turut hadir pula seorang Psikolog. [arra]

